

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Manan, 2016, *Politik Hukum Studi perbandingan dalam Praktik Ketatanegaraan Islam*, Jakarta: Prenadamedia group.
- Amirullah dan Rindyah Hanafi. 2002. *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta : Graha.
- D.Y. Witanto. 2012. *Hukum Acara Mediasi*. Bandung. Alfabeta.
- Jiwo Wungu, 2003, *Merit System*. Jakarta. Penerbit PT Raja Grafindo Persada.
- Johan Jasin, 2019, *Penegakan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Di Era Otonomi Daerah*, Yogyakarta: Deepublish.
- M. Syahbuddin Latief, 1999, *Jalan Kemanusiaan, Panduan untuk Memperkuat Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: Laper Pustaka Utama.
- Marbun dan M. Mahfud MD, 1987, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: Liberty.
- Muchsan. 1982. *Hukum Kepegawaian*. Jakarta: Bina Aksara.
- Muh Kadarisman, 2018, *Manajemen Aparatur Sipil Negara*, Depok, PT. Raja Grafindo Persada
- Nur Kholis Reefani, 2013, *Panduan Anak Berkebutuhan Khusus*, Yogyakarta: Imperium.
- Poerbakawatja, 1981, *Ensiklopedia Pendidikan*, Jakarta, Gunung Agung.
- Simamora, H. 1997, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Yogyakarta: STIE YKP.
- Soerjono Soekanto, 1981, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.
- Sondang P.Siagian. 1996. *Filsafat Administrasi*. Jakarta: Gunung Agung.
- Sri Hartini, Setiajeng Kadarsih, Tedi Sudrajat. 2008. *Hukum Kepegawaian di Indonesia*. Jakarta. Sinar Grafika.

Widiada Gunakaya, 2017, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: cv. Andi Offset.

Yuslim, 2015, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta: Sinar Grafika. Hlm. 64

Zainuddiin Ali, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)

Undang-Undang No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat

Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 tentang Pokok Pokok Kepegawian

Undang-Undang No. 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention on the Rights of Persons with Disabilities (Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas)

Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Cacat

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

Peraturan Badan Kepegawaian Negara No. 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil

C. Jurnal

Sugi Rahayu, Utami Dewi dan Marita Ahdiyana, *Pelayanan Publik Bidang Transportasi Bagi Difabel Di Daerah Istimewa Yogyakarta*, Volume 10, 1 september 2013.

D. Website atau Internet

<https://business-law.binus.ac.id/2016/04/29/pergeseran-paradigma-tentang-penyandang-disabilitas-dalam-Undang-Undang-no-8-Tahun-2016/> diakses pada 8-11-19

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190724164248-20-415187/kronologi-dokter-romi-gagal-jadi-pns-di-sumbar-karena-difabel> diakses pada 10 November 2019

<https://www.bkn.go.id/wp-content/uploads/2014/06/05.Policy-Brief-Mei-2018.pdf>.

<https://www.bkn.go.id/profil/sejarah-bkn> diakses 24 Nov. 19.

